

PROSPEK PARTAI ISLAM IDEOLOGIS DI INDONESIA

Sudarno Shobron

Universitas Muhammadiyah Surakarta
Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Surakarta 57102
Phone (0271) 717417, Fax (0271) 725448
E-mail: d4rno561@yahoo.com

Abstract: *The ideological Islamic party ever got success in Indonesia in 1955. It was represented by Masyumi and NU while in 1977 it was represented by United Development Party (PPP). But the success could not exceed the non Islamic party that got significant voters so that the Islamic parties still lost. The Reformation era gives new opportunity for Islamic parties to emerge, for instance the Crescent Star Party (PBB), Justice Party (PKS) and PPP. These Islamic political parties are permitted to compete in the general election. There are also parties that have Islamic social organization mass such as National Mandate Party (PAN) and National Awakening Party (PKB). The fate of the parties is not far different from the ideological parties in the Old Order and New Order. Accordingly there should be smart ideas to bore an ideological party for example Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) to be the participant in the general election in order that it is able to struggle the Islamic law in Indonesia, but does this ideological party have a good prospect? This article tries to give the answer.*

Key Words: *Ideological parties, Islamic law, Hizbut Tahrir Indonesia*

Abstrak: *Partai Islam Ideologis pernah mengalami kesuksesan di Indonesia pada tahun 1955 yang dipresentasikan oleh Masyumi dan NU, dan pada tahun 1977 oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun kesuksesan tersebut tidak dapat melampaui kesuksesan partai non-Islam yang mendapatkan suara cukup signifikan, sehingga partai Islam ideologis tetap kalah. Era reformasi memberikan peluang munculnya partai ideologis atau partai yang berazaskan Islam, misalnya Partai Bulan Bintang (PBB). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan PPP sendiri yang telah lolos verifikasi untuk mengikuti pemilihan umum, selain partai yang memiliki basis masa organisasi massa Islam, misalnya Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Nasib partai-partai ini tidak jauh berbeda dengan partai ideologis pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Untuk itulah perlu ada gagasan cerdas untuk menghadirkan partai ideologis misalnya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai peserta pemilu yang memperjuangkan syareat Islam di Indonesia, tetapi apakah partai ideologis ini memiliki prospek? Artikel ini akan mencoba memberikan jawaban.*

Kata Kunci: *Partai Ideologis, syareat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia*

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (pemilu) tahun 2014 tinggal satu tahun lagi. Waktu satu tahun bukanlah waktu yang panjang untuk mempersiapkan diri. Tahapan-tahapan untuk menjadi peserta pemilu mulai dari pendaftaran memperoleh badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM, mendaftar di KPU dan verifikasi peserta pemilu harus dilakukan. Sampai tahun 2012 sudah ada 73 partai yang memiliki badan hukum, namun yang mendaftar ke KPU ada 46 partai, 27 partai tidak mendaftar. Ke-46 partai yang lolos seleksi administrasi ada 34 partai, dan yang tidak lolos seleksi administrasi ada 12 partai. Kedua belas partai tersebut, 9 partai merupakan peserta pemilu tahun 2009, dan 3 partai merupakan partai politik yang baru berdiri,¹ ditambah dua partai yang lolos setelah pengawas pemilu pusat memberikan rekomendasi keabsahan menjadi peserta pemilu 2014, yakni PBB dan PKPI.

Pemilu sebagai pilar dari demokrasi merupakan pintu masuk untuk meraih kekuasaan, sehingga semua partai politik ideologis juga memasang target untuk menang pemilu. Kompetisi antar partai politik tidak dapat dihindari, satu dengan yang lain menyusun strategi dan menawarkan program-program yang dapat menjadi daya tarik calon pemilih dari semua umur dan lapisan masyarakat, bahkan dengan terus terang menyatakan bahwa partainya akan menaungi dan menerima semua etnis, agama dan golongan, yang kemudian disebut dengan partai terbuka.

Booming partai politik sebagai bentuk euphoria pada era reformasi berdasarkan undang-undang partai politik diperbolehkan membuat ciri partai, salah satunya adalah ideologi partai. Namun sejak pemilu pertama (1955) sampai pemilu 2009 tidak ada satupun partai ideologis yang memenangkan pemilu. Lantas apakah partai ideologis memiliki prospek dalam pemilu 2014? Artikel ini akan memberikan jawaban yang diawali dengan membahas partai politik didalamnya meliputi pengertian, fungsi dan tipologi partai. Kemudian mengenai partai Islam ideologis, pemilu 2014, dan diakhiri dengan prospeknya.

PARTAI POLITIK

Salah satu media untuk meraih kekuasaan (*power*) secara prosedural dan *legitimate* adalah lewat partai politik, yang memiliki basis ideologis yang kuat. Karena setiap partai politik dapat dipastikan memiliki ideologi tertentu yang akan diperjuangkan pengimplementasiannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

a. Pengertian Partai Politik

Dalam *Encyclopedia Britanica* dijelaskan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang mengajukan calon-calon jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintah. Mark N. Hagopian memberikan batasan pengertian partai politik adalah :

"as an association formed to influence the content and conduct of public policy in

¹Sembilan partai adalah Partai Pemuda Indonesia, Partai Indonesia Sejahtera, Partai Pemersatu Bangsa, Partai Pelopor, Partai Merdeka, Partai Patriot, Partai Barisan Nasional, Partai Persatuan Nahdhatul Ulama Indonesia, dan Partai Matahari Bangsa. Sedangkan tiga partai baru adalah Partai Republik Indonesia, Partai Islam, dan Partai Aksi Rakyat.

favor of some met of ideological principles and/or interests either through direct exercise of power by participation in elections"²(suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijaksanaan publik dalam kerangka prinsip-prinsip dan kepentingan ideologis tertentu melalui praktek kekuasaan secara langsung atau partisipasi rakyat dalam pemilihan).

Sedangkan Carl J. Friedrich menyatakan bahwa:

*"A political party is a group of human being, stably organized with the objective of securing or maintaining for its leaders the control of a government, with the further objective of giving to members of the party, through such control ideal and material benefit and advantages"*³(suatu partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal dan material).

Pendapat yang lain dari R.H. Soltau menjelaskan bahwa partai politik adalah:

*"A group of citizen s more or les organized, who ct as a political unit and who, by the use of their voting power, aim to control the government and carry out their general policies"*⁴(sekelompok warga Negara

yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka).

Adapun Sigmund Neumann, memberikan definisi partai politik dengan redaksi:

*"A political party is articulate organization of society's active political agents, those who are concerned with the control of governmental power and who compete for popular support with another group or groups holding divergent views"*⁵(partai politik adalah organisasi dari aktivitas-aktivitas politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan dan merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.)

Beberapa definisi tersebut di atas membawa pada pemahaman bahwa partai politik adalah kumpulan orang yang terorganisir secara rapi dengan ideologi tertentu dan kepentingan untuk meraih kekuasaan dengan penuh persaingan. Ada empat kata kunci tentang partai politik, yakni ideology (*ideology*), kepentingan (*interest*), kekuasaan (*power*), dan persaingan (*competition*).

Ideologi dan kepentingan (*interest*) suatu partai dapat mengidentifikasi dirinya dengan konstituennya. Ideologi sebagai

²Mark N.Hagopian, *Regimes, Movements, and Ideologies: A Comparative Introduction To Political Science*, (New York: Longman Inc, 1978), hlm. 302.

³Carl J. Friedrich, *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*, (Waltham Mass: Blaisdell Publishing Company, 1967), hlm. 419.

⁴Roger H.Soltau, *An Introduction to Politics*, (London: Longmans Green & Co, 1961), hlm. 199.

⁵Sigmund Neumann, "Modern Political Parties", dalam Harry Eckstein dan David E. Apter (ed.), *Comparative Politics: A Reader*, (London: The Free Press of Glencoe, 1963), hlm. 352.

landasan untuk menyusun program kerja, dan tujuan-tujuan yang akan dicapai. Bahkan visi dan misi, landasan dan prinsip-prinsip perjuangan, serta cita-cita politik tidak lepas dari ideologi. Selain itu, setiap partai politik itu dilahirkan untuk meraih kekuasaan. Untuk dapat berkuasa, maka setiap partai politik harus bersaing (kompetisi) untuk meraih suara sebanyak-banyak dari masyarakat pemilih. Dalam kompetisi inilah sering tidak dapat dihindari gesekan-gesekan yang memicu terjadi konflik antar partai politik. Oleh karena itu dibuatkan aturan-aturan atau norma-norma untuk meraih kekuasaan melalui undang-undang, sehingga kekuasaan yang nantinya didapat sudah melewati proses-proses demokrasi yang transparan.

b. Fungsi Partai Politik

Ada sembilan fungsi dari partai politik, yaitu representasi (perwakilan), konversi dan agregasi, integrasi, persuasi, represi, rekrutmen dan pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan serta kontrol terhadap pemerintah, yang terakhir fungsi dukungan.⁶*Pertama*, representasi yakni partai politik sebagai wakil dari yang memberikan mandat untuk mewakili kepentingannya, sehingga tidak lebih dari sekedar perantara. Partai politik memperjuangkan untuk mencapai kompromi atas kepentingan yang berbeda-beda. *Kedua*, konversi dan agregasi yakni partai politik melakukan perpaduan dari beberapa kepentingan, sehingga semua terakomodasi dengan baik. *Ketiga*, integrasi yang didalamnya mengandung sosialisasi, mobilisasi, dan partisipasi. *Keempat*, persuasi adalah kegiatan

partai yang dikaitkan dengan pembangunan dan pengajuan usul-usul kebijakan agar memperoleh dukungan dari berbagai pihak seluas mungkin. *Kelima*, represi adalah partai politik yang mengekang kebebasan anggota atau partai lain, sehingga ada ketakutan. *Single majority* merupakan perwujudan dari partai represif. *Keenam*, rekrutmen adalah suatu proses untuk mengajak orang masuk dalam partai agar kelak menjadi konstituen yang sewaktu-waktu siap memimpin partai. Sedangkan pemilihan pemimpin, artinya partai politik memiliki fungsi untuk memilih pemimpin nasional yang akan memimpin bangsa melalui proses-proses yang ditetapkan. Siapapun yang akan memimpin bangsa, misalnya presiden, perdana menteri harus melalui proses yang ditetapkan oleh partai politik. *Ketujuh*, partai politik berfungsi membuat pertimbangan dan perumusan kebijakan, artinya ada produk yang dihasilkan dari partai untuk membuat kebijakan politik berupa undang-undang, untuk dijalankan oleh pemerintah. *Kedelapan*, fungsi kontrol terhadap pemerintah, maksudnya bahwa jalannya pemerintah harus diawasi oleh partai agar tidak menyimpang dari undang-undang yang ditetapkan. *Kesembilan*, fungsi dukungan (*supportive function*) yaitu partai harus memberikan dukungan kepada sistem, bahkan memobilisasi, mensosialisasi dan berpartisipasi.⁷ Kesembilan fungsi partai politik di atas dapat diringkas menjadi empat fungsi, yaitu artikulasi, edukasi, agregasi, representasi.

c. Tipologi Partai Politik

Menurut Ichlasul Amal, sekurangnya ada lima jenis partai politik

⁶Roy C. Macridis, "Pengantar Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-Partai", dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hlm. 27.

⁷*Ibid.*, hlm. 27-31.

dilihat dari tingkat komitmen terhadap ideologi, yaitu partai proto, kader, massa, diktatorial, dan partai *catch-all*.⁸ *Pertama*, partai proto adalah bentuk awal suatu partai di Eropa Barat pada abad pertengahan hingga akhir abad ke-19, sehingga tidak dapat dikatakan partai modern. Esensi dari partai ini membedakan antara anggota dan non-anggota. *Kedua*, partai kader merupakan jenis partai yang belum memberikan hak pilih kepada masyarakat umum, hanya mereka dari kalangan menengah ke atas yang memiliki hak. Partai ini tidak memerlukan anggota yang besar, sehingga tidak memobilisasi massa. *Ketiga*, partai massa adalah partai yang mementingkan kuantitas anggota dan berorientasi pada basis pendukung yang luas, lintas profesi, etnis dan agama. Tujuan utamanya adalah melakukan pendidikan politik rakyat. *Keempat*, partai diktatorial, yakni sub-tipe dari partai massa, hanya saja ideologinya dipegang secara kaku dan radikal, sehingga dalam rekrutmen anggota lebih selektif. Partai ini menuntut pengabdian secara total dari setiap anggotanya. *Kelima*, partai *catch-all* merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan keuntungan bagi anggota partai.

Sedangkan menurut Roy C. Macridis ada tujuh tipe partai politik, yakni otoriter dan demokratis, integratif dan representatif, ideologis dan pragmatis, agamis dan sekuler, demokratis dan revolusioner, massa dan elit, demokratis dan oligarkhi.⁹ Untuk membuat tipologi partai didasarkan pada

tiga hal, yakni sumber dukungan partai, organisasi internal, dan tindakan.¹⁰

PARTAI ISLAM IDEOLOGIS

Berdasarkan kategorisasi atau tipologi partai politik di atas, maka partai yang memiliki ideologi tertentu dan diperjuangkan untuk dijadikan acuan dalam menyusun konstitusi dan kebijakan pemerintah, disebut partai ideologis. Indonesia sejak dikeluarkan kebijakan oleh pemerintah Orde Baru menfusikan partai politik menjadi Golkar, PPP dan PDI sejak itu tidak ada lagi partai ideologis yang memiliki karakteristik. Ketiga partai ini berideologi Pancasila, sehingga tidak memiliki daya ikat dan pikat yang dapat ditawarkan dan dijual kepada rakyat. Partai Islam ideologis yang pernah ditampilkan oleh Masyumi, kemudian diteruskan Parmusi tidak muncul dalam PPP, walau pun PPP awalnya merupakan partai politik yang berasas Islam dan bergambar Ka'bah. Keberadaan PPP dan PDI sekedar "mainan politik" pemerintah Orde Baru untuk ditunjukkan kepada rakyat Indonesia dan dunia bahwa Indonesia telah memenuhi syarat menjadi negara demokratis, sehingga dalam praktek demokrasi tidaklah sungguh-sungguh, maka disebutlah demokrasi Indonesia adalah psedo demokrasi.

Semua partai politik di negara manapun dijadikan alat untuk meraih kekuasaan. Semakin kuat partai politik semakin langgeng kekuasaan dalam genggamannya, hal ini semua dengan kecenderungan manusia dalam perspektif politik merupa-

⁸Ichlasul Amal, "Pengantar", dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1988), hlm. xii.

⁹Roy C. Macridis, "Pengantar Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-Partai", dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik...*, hlm. 31

¹⁰*Ibid.*

kan *zoon politicon* makhluk yang berpolitik, yang berjuang untuk mendapatkan kekuasaan. *Politics is power*, politik adalah kekuasaan. Atau *all politics is about power*, tulis Andrew Heywood dalam bukunya *Power, Authority and Legitimacy*.¹¹ Begitu juga esensi dari buku yang ditulis oleh Harold Lasswell's, dengan judul *Politics: Who Gets What, When, How*. Esensi politik adalah siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Dengan kata lain politik adalah siapa yang mendapatkan kekuasaan, kapan kekuasaan itu didapat, dan bagaimana caranya untuk memperoleh kekuasaan.

Secara sederhana politik suatu kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak dapat dibatasi, karena itu menjadi hak setiap orang. Ambisi untuk memperoleh kekuasaan akan diwarnai dengan perbedaan dan konflik, karenanya untuk mendapatkan kekuasaan harus diperjuangkan (*power struggle*). Untuk itulah siapa pun yang terjun ke politik, apalagi dalam bentuk politik praktis haruslah ada keinginan untuk memiliki kekuasaan. Kalau tidak ada keinginan, maka yang terjadi sebaliknya akan tergilas oleh politik itu sendiri.

Era reformasi mengandung harapan baru munculnya partai Islam ideologis, sehingga sewaktu Partai Keadilan (PK) yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan PPP yang telah kembali ke jalan yang benar dengan mencantumkan Islam sebagai asas partai, kemudian Partai Bulan Bintang (PBB), umat Islam menaruh perhatian kepada partai-partai ini menjadi partai yang besar. Harapan besar umat Islam tidak segaris lurus dengan perilaku tokoh-tokoh partai dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam.

Kehidupan jagat perpolitikan di Indonesia tidak memberi harapan perbaikan kehidupan yang mensejahterakan rakyat. Kenaikan harga-harga kebutuhan pokok rakyat yang ditetapkan oleh pemerintah, tidak mendapat perlawanan dari partai politik, bahkan sering melakukan pembenaran dengan membangun logika yang seolah-olah didasarkan pada ajaran Islam. Oleh karena itu muncul sikap apriori terhadap partai Islam ideologis di Indonesia.

Partai ideologis dan partai yang berbasis massa umat Islam yang sekarang memiliki kursi di Senayan, dan yang sedang mendaftar di KPU tidak mencerminkan partai Islam yang berkarakter, bahkan kadang penampilan politisinya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, kehadiran HTI sebagai partai politik diharapkan akan menampilkan suatu partai yang berbeda dengan partai Islam ideologis yang ada, karena partai Islam Indonesia menurut penilaian HTI bukan partai yang benar. Partai Islam yang ada sekarang ini dicirikan dengan *pertama*, partai-partai yang berkuasa lebih bercorak sekuler dan kebangsaan. Konsekuensinya, aturan-aturan yang diterapkan adalah aturan-aturan sisa peninggalan Belanda. Sistem ekonomi yang dipraktekkan pun ekonomi kapitalistik yang secara intrinsik meniscayakan kesenjangan yang hebat antara kaya dengan miskin. Kekayaan alam milik rakyat pun dibiarkan dikuasai asing dan para saudagar dalam negeri. Semuanya legal karena ditopang oleh perundang-undangan yang dibuat oleh wakil-wakil partai-partai tersebut yang duduk di parlemen.

Kedua, partai-partai Islam yang ada tidak memiliki konsepsi (*fikrah*) yang jelas dan tegas. Sebagai contoh, ketika mensikapi

¹¹ Andrew Heywood, *Political Theory An Introduction, Third Edition*. (New York: Palgrave Macmillan, 2004), hlm. 121.

fenomena kepala negara perempuan , dikatakan ini masalah fikih, semua terserah rakyat. Kalau begitu, tidak ada bedanya dengan partai-partai umumnya. Ketika ramai membicarakan amandemen UUD 1945 tentang dasar negara, sebagian aktivis partai menyatakan, "Partai kami tidak akan mendirikan negara Islam", "Kembali kepada Piagam Jakarta", dan partai Islam lainnya menyatakan "Indonesia ini plural tidak harus kembali ke Piagam Madinah di mana tiap agama menjalankan hukum masing-masing". Sikap demikian membuat umat menyimpulkan tidak ada bedanya antara partai yang menamakan partai Islam dengan partai lainnya.

Ketiga, partai-partai secara umum hanya diperuntukkan bagi kemenangan pemilu. Kegiatannya terkait persoalan rakyat hanya digiatkan menjelang Pemilu. Dalam kurun waktu antara dua pemilu, umumnya partai kurang aktif. Kalaupun aktif lebih disibukkan dengan aktivitas Pemilu untuk menoloskan calonnya. Interpelasi masalah beras atau Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hanya panas-panas tahi ayam. Ujungnya, tidak ada penyelesaian.

Keempat, tidak menjalankan metode yang jelas. Untuk melakukan perubahan di tengah masyarakat ditempuh dengan membuat undang-undang. Namun, jalannya dengan kompromi dan tambal-sulam, berkoalisi dengan partai nasionalis yang anti Islam, bahkan partai Kristen yang jelas-jelas memproklamasikan dirinya secara konsisten menentang syariat. Kalau pun menyatakan partai nasionalis religious, tidak jelas apa maksudnya. Dengan perilaku demikian rakyat tidak melihat perbedaan antara partai Islam dengan partai nasionalis, misalnya.

Kelima, tidak adanya ikatan yang kuat di antara para anggotanya. Ikatan yang ada lebih pada kepentingan. Muncullah perpecahan di dalam tubuh partai-partai Islam atau berbasis massa umat Islam.

Keenam, perilaku sebagian anggota dan pengurus tidak mencerminkan partai Islam sesungguhnya. Aliran dana untuk DPR termasuk yang tidak jelas asalnya, juga diterima oleh sebagian partai Islam. Alasannya, nanti akan dikembalikan kepada rakyat yang menjadi konstituennya. Hal ini menambah pemahaman masyarakat tentang sulitnya membedakan antara partai Islam dengan partai bukan Islam.¹²

Untuk menjadi partai politik yang dijadikan impian umat Islam, perlu muncul partai ideologis, yakni suatu partai yang memperjuangkan nilai-nilai ideologi (Islam) menjadi dasar negara dan menjadi acuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Suatu partai yang tidak hanya berorientasi meraih kekuasaan semata, tetapi partai yang memegang teguh ideologi. Dalam sejarah partai Islam di Indonesia, hanya Masyumi-lah yang menjadi partai ideologi, sehingga kehadiran HTI sebagai partai ideologis telah menghidupkan kembali partai ideologis yang pernah ada di Indonesia. Partai-partai yang bermunculan di era reformasi memang menggunakan simbol dan asas Islam. Pada awalnya mereka akan berjuang untuk menerapkan Islam secara *kâffah* di Indonesia, ternyata berubah menjadi partai yang mengejar kekuasaan saja, sehingga pola berpikir dan tindakan politiknya bersifat pragmatis.

Basis sosiologis suatu partai adalah ideologi dan kepentingan (*interest*) yang diarahkan pada usaha-usaha untuk memperoleh kekuasaan.¹³ Tanpa kedua elemen

¹²Lihat, <http://hizbut-tahrir.or.id/2008/07/30/partai-politik-dalam-islam/>

¹³Ichlasul Amal, "Pengantar", dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir...* hlm. xi.

ini sangat sulit suatu partai akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Islam sebagai ideologi partai yang formalistik sudah mulai ditinggalkan umat. Pertarungan Islam substansialistik dan Islam formalistik sudah tidak relevan lagi, maka kalau ada partai yang masih mengandalkan Islam sebagai ideologi politik harus konsisten memegang Islam. Ideologi Islam didasarkan pada pandangan tentang Islam sebagai agama yang bersifat universal.¹⁴ Universalitas ini harus dijadikan pijakan untuk menebarkan keselamatan, kerahmatan dan kedamaian ke semua manusia, sehingga semua manusia merasakan kesejukan, keharmonisan dan kedamaian dalam berislam dan hidup berdampingan dengan umat Islam. Pemahaman yang semacam ini harus dijabarkan dalam bentuk aksi nyata yang terukur dalam program partai. Partai-partai yang semula bersikukuh dengan Islam formalis yang eksklusif, akhirnya melakukan perubahan dan mengganti menjadi inklusif, sehingga menjadi partai terbuka yang menerima anggota dari non-Islam.

Rapat Kerja Nasional PKS di Bali berkembang keinginan dari kadernya, bahwa PKS lebih baik menjadi partai terbuka, yakni menerima calon legislatif dari non-muslim. Keinginan sebagian kader ini, menurut Tifatul Sembiring sebagai Presiden Partai pada saat itu, adalah sesuatu yang wajar, mengingat untuk daerah bagian timur mayoritas masyarakat adalah non-

muslim.¹⁵ Namun akhirnya tetap diputuskan bahwa PKS bukan partai inklusif, melainkan partai kader, partai dakwah yang berasaskan Islam.¹⁶ Begitu juga PPP, melalui Ketua Umumnya, Suryadharma Ali, beberapa kali dinyatakan bahwa PPP merupakan partai terbuka, sehingga konstituennya tidak hanya umat Islam saja, melainkan juga umat non-Islam, termasuk Cina.

Apakah kalau menjadi partai terbuka, lantas partai-partai Islam akan menang dalam pemilu atau dapat menaikkan jumlah suara yang signifikan? Rupanya tidak juga, karena berdasarkan pengalaman sejarah PAN dan PKB sebagai partai terbuka dan berideologi Pancasila, dengan harapan memperoleh suara yang besar, dan keduanya sama-sama memiliki struktur budaya dan struktur sosial yang kuat, yakni Muhammadiyah dan NU, tidak pernah menang dalam pemilu, bahkan dari pemilu ke pemilu perolehan suara terus merosot. Apakah kalau menjadi partai eksklusif dengan mencantumkan Islam sebagai ideologi partai, lantas juga akan menang dalam pemilu atau mendapatkan jumlah suara yang signifikan? Jawabannya, tidak juga. PPP, PKS, PBB, PBR dan PMB misalnya, perolehan suara mereka juga merosot, bahkan PBB, PBR dan PMB tidak lolos *parliamentary threshold*, sehingga tidak memiliki wakilnya di parlemen. Tidak mencantumkan Islam sebagai ideologi partai, kalah dalam pemilu, mencantumkan Islam

¹⁴Khalifa Abdul Hakim, *Islamic Ideology* (Lahore: Institute of Islamic Culture, 1993), hlm. iv.

¹⁵*Republika*, Selasa 12 Pebruari 2008, hlm. 6.

¹⁶Istilah 'terbuka' tidak pernah menjadi keputusan partai, demikian penjelasan (*bayân*) resmi PKS seputar isu partai terbuka dan caleg non-muslim. Penjelasan terbuka tersebut diteken Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua Dewan Syariah Partai (DSP) Surahman Hidayat, dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Suharna Surapranata. Dengan penegasan itu, dewan pimpinan tinggi partai (DPTP) memerintah seluruh jajaran struktur, pengurus, serta kader PKS supaya tidak lagi mewacanakan isu "partai terbuka". "Itu untuk menghindari mudarat yang lebih besar daripada kemaslahatanyangdiharapkan", tegasTifatul. Lihat, *Republika*, Sabtu12Pebruari2008, hlm.1.

sebagai ideologi, partai Islam juga kalah, bahkan cenderung tidak dilirik oleh umat Islam.

Namun demikian perlu ada partai ideologis di Indonesiayang menebarkan kerahmatan bagi umat dan bangsa. Ada beberapa pemikiran yang perlu dipertimbangkan. *Pertama*, umat Islam yang jumlahnya besar ini wajib memiliki wadah politik untuk menyalurkan aspirasi dan orientasi politiknya. Diyakini bahwa masih banyak umat Islam yang memandang berpolitik itu bagian dari ibadah, dan mereka hanya mau menyalurkan ke partai politik Islam.

Kedua, harus ada kesadaran kolektif umat Islam bahwa dakwah yang efektif itu melalui jalur struktur atau politik, dengan tidak meninggalkan jalur kultural. Kalau umat Islam telah memegang kunci atau memiliki kekuasaan, maka dengan mudah untuk melakukan dakwah amar makruf nahi munkar melalui undang-undang resmi negara, peraturan pemerintah, peraturan daerah (perda) dan bentuk peraturan lainnya yang bersifat mengikat masyarakat.

Ketiga, harus ada perubahan nalar kolektif umat Islam, yang semula memandang politik itu urusan duniawi menjadi urusan ukhrawi juga, maka menjatuhkan pilihan dalam setiap pemilu itu wilayah ibadah.

Keempat, bentuk partai politik Islam harus tetap terbuka, karena Islam itu *rahmatan lil'alamien*, hanya saja harus dapat menawarkan program-program yang langsung dinikmati oleh masyarakat.

Kelima, partai politik Islam harus mencantumkan ideologinya Islam, dengan penampilan dan pemaknaan yang baru.

Keenam, pemimpin partai harus memenuhi kriteria sebagai pemimpin Islam, yakni kriteria internal, sidiq, amanah, tabligh dan fathanah. Dalam bahasa hadis, seorang pemimpin itu harus *dhabid* (cerdas) dan *ghairu syadz* (tidak cacat moral).¹⁷

Melihat realitas politik di Indonesia, apakah ada partai Islam ideologis yang bertarung dalam pemilu 2014? Melihat partai Islam yang mendaftar ke KPU dengan jelas tidak ada partai ideologis yang mengikuti pemilu, yang ada adalah partai Islam pragmatis yang hanya sekedar mencari kekuasaan belaka, bahkan kemungkinan melakukan praktek akuisisi partai politik tidak dapat dihindarkan. Partai politik yang tidak lolos verifikasi bisa jadi akan menjual KTP konstituennya kepada partai lain dalam rangka untuk memenuhi jumlah konsituten partai.

Ada harapan HTI menjadi partai politik yang mengikuti proses-proses pemilu sebagaimana Ikhwanul Muslimin di Mesir. Mengikuti pemilu di Indonesia akan menjadi akses bagi HTI untuk mengatur kekuasaan, yang pada akhirnya dapat mengubah menjadi sistem Islam dapat dilaksanakan.¹⁸ Karena bagaimana pun juga HTI tidak hidup di "awang-awang" yang bergantung dalam alam normatif, alam idealitas saja, tetapi harus membumi ke dalam kehidupan nyata, tempat mereka berpijak, berteduh, dan berjalan di atas pilar-pilar demokrasi, yakni salah satunya akan me-

¹⁷Pemimpin harus memiliki *leadership* yang kuat dan *skill manajerial* yang memadai. Sedangkan kriteria eksternal adalah dapat diterima oleh semua pihak, disenangani oleh umat Islam dan disegani oleh umat non-Islam.

¹⁸Robitul Firdaus, *Pemisahan Kekuasaan dan Organisasi Negara dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Komparatif terhadap Dustur al-Islamy Hizbut Tahrir dan Qanun asasi NII*. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010), hlm. 76.

ngikuti pemilu. Untuk menjadi peserta pemilu, sebuah partai politik harus mendaftar di Kementerian Hukum dan HAM, dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh konstitusi. UU Partai Politik yang baru mengatur bahwa setiap partai politik harus diverifikasi oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk dapat disahkan menjadi peserta pemilu tahun 2014 harus mempunyai kepengurusan 100 % tingkat propinsi, berarti 33 propinsi, dan mempunyai minimal 75% kepengurusan tingkat kabupaten/kota di setiap propinsi (berarti 375 kabupaten/kota), dan minimal 50% di tingkat kecamatan di setiap kabupaten/kota, atau 2500 kepengurusan partai di tingkat kecamatan. Selain itu setiap partai politik harus mempunyai kantor tetap di tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilihan umum. Tiap partai politik harus memiliki rekening atas nama partai. Persyaratan tersebut sungguh berat bagi partai politik yang baru, karena itu semua membutuhkan kerja keras, dan keuangan yang lebih dari cukup.

Namun ternyata faktor ideologi politik sekarang ini sudah mulai bergeser menjadi ideologi kepentingan, dan inilah politik yang berpikir jangka pendek. Membicarakan koalisi yang berpijak dari kesamaan ideologi sudah tidak relevan lagi. Menurut Azyumardi Azra, faktor yang menentukan adalah kepentingan-kepentingan politik untuk menggapai dan mendapatkan porsi dalam kekuasaan, yang masih terus dalam konstestasi. Perbedaan-perbedaan ideologis atau tepatnya ideologi politik yang merupakan *raison de'atre* masing-masing

partai, terlihat terkesampingkan, menjadi tidak relevan.¹⁹

Pergeseran ideologis ke pragmatis rupanya menjadi keharusan sejarah di era politik kontemporer ini, karena kalau tetap mempertahankan ideologi agama akan ditinggalkan oleh pemilih dan sudah tidak relevan lagi. Pergeseran ini memberikan dampak kepada rakyat yang setiap tahun memberikan hak untuk mengikuti pemilu, yakni juga berpikir pragmatis. Dalam pemilu 2009, uang menjadi salah satu faktor untuk menentukan pilihannya, selagi amplop yang berisi uang yang lebih besar, itulah yang dipilih. Rupanya pola berpikir pragmatis ini akan terus muncul dalam setiap pemilu, pemilukada (pemilihan gubernur/wakil, dan walikota-bupati/wakil). Banyak yang menyatakan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2009 memiliki kemiripan dengan pemilihan kepala desa yang juga menggunakan uang untuk membeli suara pemilih, dan pemilih pun akan memberikan dukungan kepada calon yang memberikan uang lebih besar.

Pragmatisme²⁰ dalam berpolitik itu membunuh jati diri sebuah partai Islam, apalagi sampai "melacurkan partai" hanya karena imbalan kursi menteri atau duta besar. Partai Islam harus memiliki jati diri yang kokoh, dan semangat yang tinggi untuk bekerjasama antar partai Islam, sehingga memiliki daya tawar yang tinggi dihadapan partai-partai sekuler, tidak seperti yang terjadi sekarang. Partai-partai Islam yang mendapatkan tiket masuk ke parlemen hanya dijadikan mesin politik untuk mendulang suara bagi partai sekuler.

¹⁹Azyumardi Azra, "Politik Kepentingan", dalam *Republika*, Kamis 7 Mei 2009, hlm. 6.

²⁰Pragmatisme adalah pandangan filosofis yang meletakkan realitas tertinggi adalah kenyataan, terbukti bermanfaat bagi para pelaku dan masyarakat. George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj: Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), hlm. 374.

Mereka tidak dapat berbuat sesuai dengan platform dan program kerja yang telah dijanjikan kepada masyarakat luas. Partai-partai tersebut sibuk dengan kepentingan untuk dirinya sendiri dan partainya.

Memang untuk melakukan perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik tidak hanya lewat partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Perubahan justru seringkali terjadi di luar parlemen. Perubahan itu dapat tumbuh apabila masyarakat menginginkan dan pemegang kekuatan (*ahlul quwwah*/militer) mendukungnya, misalnya yang terjadi di Mesir. Ketika masyarakat menginginkan diktator Husni Mubarak turun dan militer pun mendukung masyarakat, maka Mubarak pun lengser. Tetapi ketika dukungan militer terpecah, seperti halnya di Libya, maka rezim Muammar Qaddafi sulit untuk diturunkan. Lebih lanjut Farid mengungkapkan, perubahan di Mesir itu tidak mendasar, karena sekedar mengganti rezim saja. Hal itu terjadi karena pemahaman masyarakat akan sistem yang menerapkan syariat Islam secara *kâffah* masih kabur. Itulah pentingnya melakukan pembinaan dan penyadaraan ditengah masyarakat tentang wajibnya menerapkan syariah Islam dalam bingkai *khilâfah*.²¹

Partai ideologis merupakan alternatif yang kehadirannya merupakan suatu kemestian, karena mengandalkan partai Islam yang telah ada rupanya sulit untuk dijadikan tumpuan perjuangan menerapkan syariat Islam secara *kaffah*. Penerapan syariat Islam harus didukung oleh partai ideologis yang di dalamnya berkumpul

orang-orang yang memiliki spirit dan militansi berjuang. Hal ini ditandai dengan *pertama*, perilakunya harus selalu tunduk pada *mabda'* dan terikat dengan apa yang diperintahkan dan dilarang oleh *mabda'*. *Kedua*, berjuang untuk menyebarkan *mabda'* ke tengah-tengah masyarakat dengan cara mengajak ke *mabda'*, dan menciptakan kesadaran umum pada *mabda'*.²² Ideologi atau *mabda'* sebagai daya ikatan di antara para pengikut untuk menyamakan langkah, menyatukan persepsi, dan meluruskan dan menjadikan barisan yang kokoh yang tidak tergiur dengan berbagai macam tawaran ideologi lainnya. Ideologi menjadi pusat semangat, dan daya dorong dari dalam diri setiap pengikutnya untuk tidak gentar menghadapi cobaan dan hambatan dalam mengimplementasikan ideologi dalam kehidupan nyata yang dibimbing oleh al-Qur'an dan as-Sunnah.

Partai ideologis akan terwujud dengan syarat adalah *pertama*, perbanyak sel-sel dengan pembentukan sel-sel lain yang meyakini ideologi atas dasar kesadaran dan pemahaman yang sempurna. *Kedua*, pembentukan kesadaran umum terhadap ideologi di tengah-tengah umat secara menyeluruh.²³ Model sel ini juga diterapkan oleh partai politik mana pun dengan ideologi apa pun juga. Pada masa Orde Baru, model sel diterapkan oleh Golongan Karya, pengawasan melekat, dan organisasi *onderbouw*-nya. Bahkan gerakan Islam politik yang bergerak secara sembunyi-sembunyi juga menggunakan model sel ini. Setiap kader yang *mabda'*-nya telah tidak diragukan lagi memiliki tugas untuk mengajak keluarga,

²¹Lihat <http://hizbut-tahrir.or.id/2011/04/22/antv-berani-tidak-hti-menjadi-parpol/>

²²Muhammad Hawari, 2003. *Politik Partai Islam Meretas Jalan Baru Perjuangan Partai Politik Islam*, terj.: Syamsuddin Ramadhan SF. (Bogor: IDeA Pustaka Utama, 2003), hlm. 170.

²³Taqiuddin an-Nabhani, *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj.: Zakaria, Labin dkk. (Jakarta: HTI Press, 2008), hlm. 35-36.

tetangga, teman sejawat, dan siapa pun yang dapat dihubungi untuk didakwahi tentang *mabda'*, yang kemudian diajak untuk menjadi anggotanya. Begitu seterusnya, sehingga dengan model sel ini anggota akan terus bertambah. Satu orang mengkader lima orang, dan lima orang ini masing-masing mengkader lima orang, sehingga sudah ada 25 orang. Dari 25 orang ini masing-masing mencari anggota dan mengkader lima orang, sehingga menjadi 125 orang, begitu seterusnya. Dengan begitu, maka lahirlah kader-kader militan yang semua jiwa dan raga mereka diwakafkan untuk kemajuan dan perkembangan partainya. Mereka tidak tergiur dengan berbagai macam ajakan *hizb* lain yang memberikan janji masa depan yang lebih gemilang.

Kasus kader loncat seperti yang diperlihatkan oleh kader partai di Indonesia menggambarkan sangat rentannya ideologi yang dipegang. Mereka dengan mudah pindah dari satu partai politik ke partai lainnya. Apa yang selama ini diperjuangkan tidak ada hubungannya dengan ideologi. Mereka hanya memperjuangkan dan tetap ingin mendapatkan kekuasaan melalui partai politik yang memberikan peluang untuk itu.

Partai ideologis seperti yang ditampilkan oleh HTI dalam jagat perpolitikan Indonesia akan menjadi harapan banyak orang, karena sistem pemerintah dan politik yang selama ini dipegang teguh tidak dapat memberikan kesejahteraan dan rasa aman kepada warganya. Namun harus diakui, bahwa usaha-usaha yang dilakukan oleh HTI untuk menerapkan *khilâfah al-Islâmiyyah* di Indonesia masih dalam proses, sehingga belum dapat disimpulkan telah atau belum berhasil. Tetapi dengan telah menyebarnya HTI ke dalam 33 propinsi dan 300 kota/kabupaten di seluruh Indonesia, dapat dikatakan secara kelembagaan

HTI telah berkembang dengan baik. Perkembangan kelembagaan ini sungguh fantastis, karena baru seumur jagung, HTI telah berhasil melebarkan sayapnya ke seluruh Indonesia. Ini berarti ide-ide dan konsep *khilâfah al-Islâmiyyah* telah dapat diterima oleh sebagian umat Islam yang tersebar dalam propinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

PESERTA PEMILU 2014

Apapun ideologi partai politik yang akan memperoleh kekuasaan harus melalui langkah-langkah prosedural sesuai dengan UU Partai Politik dan UU Pemilu, yang dibahas dan diputuskan oleh anggota parlemen yang terdiri dari berbagai partai politik yang memiliki hak suara. Sudah barang tentu setiap partai politik memiliki kepentingan terhadap UU tersebut agar tetap dapat dengan mudah memperoleh kursi di parlemen. Tarik menarik terjadi dalam pembahasan untuk menentukan besarnya *parliamentary threshold* (PT), sebagaimana tergambar dalam Rapat Pleno Badan Legislasi DPR RI pada tanggal 4 April 2011 yang menyepakati angka ambang batas parlemen 3%, yang kemudian berkembang menjadi 3,5% sebagai jalan tengah dari berbagai fraksi yang memberi usulan berbeda-beda.

Sembilan fraksi yang telah menyampaikan sikapnya terhadap ambang batas parlemen tersebut, ada tujuh fraksi yang sepakat 3%, dan ada dua fraksi yang menolak, yakni Demokrat dan Hanura. Demokrat semula mengusulkan 4%, dan Hanura tetap 2,5%. Karena belum ada kata final, maka kalau kemungkinan divoting, angka 3% akan menang. Kalau ini yang terjadi, maka menjadi beban berat bagi partai-partai kecil, dan partai yang pada pemilu 2009 telah lolos PT 2,5%. Kesepakatan para politikus di atas dituangkan dalam Pasal 202

ayat (1) bahwa partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 3% dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi di DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kesepakatan ini merupakan revisi terhadap UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif. Angka PT tersebut malah berkembang tidak hanya 3%, partai-partai besar dan pemerintah mengusulkan 4-5%. Usulan ini mendapat reaksi keras dari partai menengah di DPR, terutama PKB, PAN dan PPP dengan membentuk poros tengah.²⁴

Angka 3,5% ambang batas parlemen atau *parliamentary threshold* (PT) bukan syarat yang mudah untuk diberlakukan bagi partai politik yang akan mengikuti pemilihan umum (Pemilu 2014). Oleh karena itu ada tujuh belas partai politik yang tidak memiliki wakilnya di DPR RI mengajukan uji materi terhadap undang-undang nomor 8/2011 tentang pemilu legislatif ke Mahkamah Konstitusi (MK). Keputusan MK nomor 52/PUU-X/2012 tertanggal 15 Agustus 2012, mengabulkan pasal 8 ayat 1 dan 2, pasal 17 ayat 1, pasal 208 dan pasal 209, dengan alasan *pertama*, PT sejak awal tidak dimaksudkan menjadi sebagai syarat menjadi peserta dalam pemilu berikutnya. Fungsi PT dimaksudkan sebagai ambang batas perolehan suara bagi partai politik untuk mendudukkan wakilnya di DPR. *Kedua*, syarat menjadi peserta pemilu pada tahun 2014 yakni tidak hanya untuk peserta yang baru, tetapi juga berlaku untuk partai yang telah memiliki wakilnya di DPR RI, yakni 9 partai.

Syarat menjadi peserta pemilu bagi partai politik tahun 2014 adalah:

1. Berstatus Badan Hukum sesuai dengan undang-undang tentang partai politik.
2. Memiliki kepengurusan di seluruh propinsi (100%)
3. Memiliki kepengurusan di 75% kabupaten/kota di propinsi bersangkutan.
4. Memiliki kepengurusan di 50% kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan
5. Menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
6. Memiliki sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik di kabupaten/kota yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA.
7. Mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota sampai tahap terakhir pemilu.
8. Mengajukan nama, lambang, tanda gambar partai politik kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
9. Menyerahkan nomor rekening dana kampanye pemilu atas nama partai politik tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota kepada KPU.²⁵

Syarat-syarat tersebut memang cukup berat bagi partai politik yang akan mendaftarkan ke KPU, sehingga kalau ada 27 partai yang tidak mendaftar dapat dipahami. Partai politik yang pada pemilu 2009 lolos ke Senayan saja kalau diverifikasi secara benar belum tentu memenuhi syarat,

²⁴*Republika*, Rabu 2 November 2011, hlm. 3. Dalam UU Pemilu 2008 dijelaskan bahwa Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara sekurang-kurangnya 2,5 % dari jumlah suara yang sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. RUU usulan DPR menjadi 3%, sedangkan RUU usulan pemerintah menjadi 4%.

²⁵Lihat UU No 8/2012 tentang Pemilu Legislatif.

sehingga kemungkinan tidak lolos itu sangat terbuka. Ada komentar dari politisi Senayan yang menolak persyaratan tersebut diberlakukan ke partainya, mereka menginginkan partainya secara otomatis tidak diverifikasi, sehingga lolos menjadi peserta pemilu 2014. Padahal sesungguhnya ada keadilan syarat tersebut diberlakukan untuk semua partai yang akan mengikuti pemilu 2014. Kenapa dikatakan adil? Karena bisa jadi sembilan partai yang duduk di Senayan tidak lagi memiliki kantor di wilayah dan daerah sebagaimana disyaratkan. Kehidupan kantor partai politik kadang hanya pada saat ada hajatan pemilu dan pemilukada, kecuali partai politik yang didukung modal besar.

PROSPEK

Melihat perjalanan partai Islam di Indonesia sejak pemilu 1955 sampai 2009 tidak pernah menang pemilu dibandingkan dengan partai yang bukan Islam, sehingga kadang menimbulkan pesimis. Namun kalau melihat perkembangan pemahaman umat Islam terhadap agamanya yang melahirkan kelompok Islam salafi dan fundamentalis, ada sedikit harapan akan lahirnya era baru partai Islam ideologis. Harapan itu didasarkan pada analisis SWOT berikut ini:

Kekuatan	Kelemahan	Peluang	Ancaman
Kelompok Islam fanatik terhadap partai Islam.	Tidak ada persamaan persepsi tentang perlunya Negara berdasarkan nilai-nilai Islam.	Kompetisi terbuka meraih suara rakyat.	Benturan dengan sesama partai berbasis massa Islam.
Kelompok Islam Salafi	Tokoh-tokoh Islam masing-masing ingin memimpin.		Konflik dengan sesama kekuatan yang islamophobia
Kelompok Islam Fundamentalisme	Tidak ada hubungan ketaatan agama dengan pilihan politiknya.		
Kelompok Islam Politik yang bercita-cita tegaknya Negara Islam	Stigma Islam radikal, teroris.		

Berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman di atas, rupanya partai ideologis belum memiliki prospek yang menggembirakan di Indonesia, namun kehadiran partai ideologis suatu keharusan sejarah. Suara umat Islam yang tidak terwadahi di partai yang ada, karena dianggap tidak tepat sebagai wadah umat Islam akan menyalurkan aspirasi politiknya ke partai ideologis, walau pun mereka sadar bahwa partainya yang didukung tidak

akan mendapat suara yang signifikan, bahkan kalah dalam pemilu. Prediksi politik dengan *parliamentary threshold* 3,5% cukup berat bagi partai ideologis dapat lolos ke Senayan.

KESIMPULAN

Uraian panjang yang telah dipaparkan disertai analisis secukupnya di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kesuksesan suatu partai ideologis pada masa lalu belum dapat dijadikan ukuran akan diraihinya kesuksesan partai ideologis pada masa sekarang.
2. Menghadirkan kembali partai ideologis yang hanya didasarkan pada romantisme merupakan kesalahan strategi, karena perubahan berpikir umat Islam telah bergeser akibat perkembangan dan tingkat pendidikan.
3. Sejarah tidak harus diulang, melainkan harus diambil hikmahnya. Kekalahan partai ideologis harus menjadi pelajaran berharga untuk tidak mengulang kekalahan tersebut dengan menerapkan strategi yang sesuai dengan perkembangan umat Islam.
4. Munculnya gerakan Islam salafi dan fundamentalis di Indonesia menjadi kekuatan tersendiri bagi partai ideologis, sehingga kehadiran partai ideologis sangat dibutuhkan oleh sebagian umat Islam Indonesia.
5. Pada pemilihan umum tahun 2014, partai ideologis belum dapat meraih suara signifikan dari umat Islam, karena ada perubahan berpikir sebagian umat Islam daripada berpikir ideologis ke pragmatis.
6. Hizbut Tahrir Indonesia memiliki peluang untuk menjadi partai ideologis di Indonesia, dengan konsisten memperjuangkan tegaknya syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Amal, Ichlasul, 1988. "Pengantar", dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Azra, Azyumardi, 2009. "Politik Kepentingan", dalam *Republika*, Kamis 7 Mei 2009.
- Firdaus, Robitul, 2010. *Pemisahan Kekuasaan dan Organisasi Negara dalam Sistem Pemerintahan Islam (Studi Komparatif terhadap Dustur al-Islamy Hizbut Tahrir dan Qanun asasi NII)*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Friedrich Carl J. 1967. *Constitutional Government and Democracy: Theory and Practice in Europe and America*. Waltham Mass: Blaisdell Publishing Company.
- Hagopian, Mark N., 1978. *Regimes, Movements, and Ideologies: A Comparative Introduction To Political Science*. New York: Longman Inc.
- Hakim, Khalifa Abdul, 2008. *Islamic Ideology*. Lahore: Institute of Islamic Culture
- Hawari, Muhammad, 2003. *Politik Partai Islam Meretas Jalan Baru Perjuangan Partai Politik Islam*, terj.: Syamsuddin Ramadhan SF. Bogor: IDeA Pustaka Utama.
- Heywood, Andrew, 2004. *Political Theory An Introduction, Third Edition*. New York: Palgrave Macmillan.
- Macridis, Roy C., 1988. "Pengantar Sejarah, Fungsi dan Tipologi Partai-Partai", dalam Ichlasul Amal. 1988. "Pengantar", dalam Ichlasul Amal (ed.), *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Nabhani, Taqiyuddin an-. 2008. *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj.: Zakaria, Labin dkk., Jakarta: HTI Press.

Neumann, Sigmund, 1963. "Modern Political Parties", dalam Harry Eckstein dan David E. Apter (ed.). 1983. *Comparative Politics: A Reader*. London: The Free Press of Glencoe.

Republika, Selasa 12 Pebruari 2008; Rabu 2 November 2011.

Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, 2008. *Terori Sosiologi dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*, terj: Nurhadi. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Soltau, Roger H., 1961. *An Introduction to Politics*. London: Longmans Green & Co.

UU Nomor 8/2012 tentang Pemilu Legislatif.